



PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 59 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dilakukan oleh Bupati;
- b. bahwa klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan perlu diatur kembali dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang

- seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
 9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 10. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan, dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.
 11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 12. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.
 13. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
 14. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai Pasar rata rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
 15. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.

BAB II KLASIFIKASI NJOP

Pasal 2

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi dan klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan yang tercantum dalam lampiran I, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

BAB III TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 3

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan untuk masing-masing Desa atau Kelurahan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memuat NJOP Bumi dan DBKB.
- (2) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata dalam suatu Zona Nilai Tanah.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan.

Pasal 5

Bentuk format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2014
BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN, B.

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

GANI SUHUD
BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB P2

A. Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi Untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00	s/d	69,700,000.00	68,545,000.00
002	> 65.120.000,00	s/d	67,390,000.00	66,255,000.00
003	> 62.890.000,00	s/d	65,120,000.00	64,000,000.00
004	> 60.700.000,00	s/d	62,890,000.00	61,795,000.00
005	> 58.550.000,00	s/d	60,700,000.00	59,625,000.00
006	> 56.440.000,00	s/d	58,550,000.00	57,495,000.00
007	> 54.370.000,00	s/d	56,440,000.00	55,405,000.00
008	> 52.340.000,00	s/d	54,370,000.00	53,355,000.00
009	> 50.350.000,00	s/d	52,340,000.00	51,345,000.00
010	> 48.400.000,00	s/d	50,350,000.00	49,375,000.00
011	> 46.490.000,00	s/d	48,400,000.00	47,445,000.00
012	> 44.620.000,00	s/d	46,490,000.00	45,555,000.00
013	> 42.790.000,00	s/d	44,620,000.00	43,705,000.00
014	> 41.000.000,00	s/d	42,790,000.00	41,895,000.00
015	> 39.250.000,00	s/d	41,000,000.00	40,125,000.00
016	> 37.540.000,00	s/d	39,250,000.00	38,395,000.00
017	> 35.870.000,00	s/d	37,540,000.00	36,705,000.00
018	> 34.240.000,00	s/d	35,870,000.00	35,055,000.00
019	> 32.650.000,00	s/d	34,240,000.00	33,445,000.00
020	> 31.100.000,00	s/d	32,650,000.00	31,875,000.00
021	> 29.590.000,00	s/d	31,100,000.00	30,345,000.00
022	> 28.120.000,00	s/d	29,590,000.00	28,855,000.00
023	> 26.690.000,00	s/d	28,120,000.00	27,405,000.00
024	> 25.300.000,00	s/d	26,690,000.00	25,995,000.00
025	> 23.950.000,00	s/d	25,300,000.00	24,625,000.00
026	> 22.640.000,00	s/d	23,950,000.00	23,295,000.00
027	> 21.370.000,00	s/d	22,640,000.00	22,005,000.00
028	> 20.140.000,00	s/d	21,370,000.00	20,755,000.00
029	> 18.950.000,00	s/d	20,140,000.00	19,545,000.00
030	> 17.800.000,00	s/d	18,950,000.00	18,375,000.00
031	> 16.690.000,00	s/d	17,800,000.00	17,245,000.00
032	> 15.620.000,00	s/d	16,690,000.00	16,155,000.00
033	> 14.590.000,00	s/d	15,620,000.00	15,105,000.00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
034	> 13.600.000,00	s/d	14,590,000.00	14,095,000.00
035	> 12.650.000,00	s/d	13,600,000.00	13,125,000.00
036	> 11.740.000,00	s/d	12,650,000.00	12,195,000.00
037	> 10.870.000,00	s/d	11,740,000.00	11,305,000.00
038	> 10.040.000,00	s/d	10,870,000.00	10,455,000.00
039	> 9.250.000,00	s/d	10,040,000.00	9,645,000.00
040	> 8.500.000,00	s/d	9,250,000.00	8,875,000.00
041	> 7.790.000,00	s/d	8,500,000.00	8,145,000.00
042	> 7.120.000,00	s/d	7,790,000.00	7,455,000.00
043	> 6.490.000,00	s/d	7,120,000.00	6,805,000.00
044	> 5.900.000,00	s/d	6,490,000.00	6,195,000.00
045	> 5.350.000,00	s/d	5,900,000.00	5,625,000.00
046	> 4.840.000,00	s/d	5,350,000.00	5,095,000.00
047	> 4.370.000,00	s/d	4,840,000.00	4,605,000.00
048	> 3.940.000,00	s/d	4,370,000.00	4,155,000.00
049	> 3.550.000,00	s/d	3,940,000.00	3,745,000.00
050	> 3.200.000,00	s/d	3,550,000.00	3,375,000.00
051	> 3.000.000,00	s/d	3,200,000.00	3,100,000.00
052	> 2.850.000,00	s/d	3,000,000.00	2,925,000.00
053	> 2.708.000,00	s/d	2,850,000.00	2,779,000.00
054	> 2.573.000,00	s/d	2,708,000.00	2,640,000.00
055	> 2.444.000,00	s/d	2,573,000.00	2,508,000.00
056	> 2.261.000,00	s/d	2,444,000.00	2,352,000.00
057	> 2.091.000,00	s/d	2,261,000.00	2,176,000.00
058	> 1.934.000,00	s/d	2,091,000.00	2,013,000.00
059	> 1.789.000,00	s/d	1,934,000.00	1,862,000.00
060	> 1.655.000,00	s/d	1,789,000.00	1,722,000.00
061	> 1.490.000,00	s/d	1,655,000.00	1,573,000.00
062	> 1.341.000,00	s/d	1,490,000.00	1,416,000.00
063	> 1.207.000,00	s/d	1,341,000.00	1,274,000.00
064	> 1.086.000,00	s/d	1,207,000.00	1,147,000.00
065	> 977.000,00	s/d	1,086,000.00	1,032,000.00
066	> 855.000,00	s/d	977,000.00	916,000.00
067	> 748.000,00	s/d	855,000.00	802,000.00
068	> 655.000,00	s/d	748,000.00	702,000.00
069	> 573.000,00	s/d	655,000.00	614,000.00
070	> 501.000,00	s/d	573,000.00	537,000.00
071	> 426.000,00	s/d	501,000.00	464,000.00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m ²)
072	> 362.000,00	s/d	426.000.00	394.000.00
073	> 308.000,00	s/d	362.000.00	335.000.00
074	> 262.000,00	s/d	308.000.00	285.000.00
075	> 223.000,00	s/d	262.000.00	243.000.00
076	> 178.000,00	s/d	223.000.00	200.000.00
077	> 142.000,00	s/d	178.000.00	160.000.00
078	> 114.000,00	s/d	142.000.00	128.000.00
079	> 91.000,00	s/d	114.000.00	103.000.00
080	> 73.000,00	s/d	91.000.00	82.000.00
081	> 55.000,00	s/d	73.000.00	64.000.00
082	> 41.000,00	s/d	55.000.00	48.000.00
083	> 31.000,00	s/d	41.000.00	36.000.00
084	> 23.000,00	s/d	31.000.00	27.000.00
085	> 17.000,00	s/d	23.000.00	20.000.00
086	> 12.000,00	s/d	17.000.00	14.000.00
087	> 8.400,00	s/d	12.000.00	10.000.00
088	> 5.900,00	s/d	8.400.00	7.150.00
089	> 4.100,00	s/d	5.900.00	5.000.00
090	> 2.900,00	s/d	3.500.00	4.100.00
091	> 2.000,00	s/d	2.900.00	2.450.00
092	> 1.400,00	s/d	2.000.00	1.700.00
093	> 1.050,00	s/d	1.400.00	1.200.00
094	> 760,00	s/d	1.050.00	910
095	> 550,00	s/d	760.00	660
096	> 410,00	s/d	550.00	480
097	> 310,00	s/d	410.00	350
098	> 240,00	s/d	310.00	270
099	> 170,00	s/d	240.00	200
100	≤ 170,00	s/d		140

B. Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Untuk Objek Pajak Sektor Perdesaan Dan Sektor Perkotaan

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
001	> 14.700.000,00	s/d	15.800.000.00	15.250.000.00
002	> 13.600.000,00	s/d	14.700.000.00	14.150.000.00
003	> 12.550.000,00	s/d	13.600.000.00	13.075.000.00
004	> 11.550.000,00	s/d	12.550.000.00	12.050.000.00

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)			Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m ²)
005	> 10.600.000,00	s/d	11,550,000.00	11,075,000.00
006	> 9.700.000,00	s/d	10,600,000.00	10,150,000.00
007	> 8.850.000,00	s/d	9,700,000.00	9,275,000.00
008	> 8.050.000,00	s/d	8,850,000.00	8,450,000.00
009	> 7.300.000,00	s/d	8,050,000.00	7,675,000.00
010	> 6.600.000,00	s/d	7,300,000.00	6,950,000.00
011	> 5.850.000,00	s/d	6,600,000.00	6,225,000.00
012	> 5.130.000,00	s/d	5,850,000.00	5,500,000.00
013	> 4.500.000,00	s/d	5,150,000.00	4,825,000.00
014	> 3.900.000,00	s/d	4,500,000.00	4,200,000.00
015	> 3.350.000,00	s/d	3,900,000.00	3,625,000.00
016	> 2.850.000,00	s/d	3,350,000.00	3,100,000.00
017	> 2.400.000,00	s/d	2,850,000.00	2,625,000.00
018	> 2.000.000,00	s/d	2,400,000.00	2,200,000.00
019	> 1.666.000,00	s/d	2,000,000.00	1,833,000.00
020	> 1.366.000,00	s/d	1,666,000.00	1,516,000.00
021	> 1.034.000,00	s/d	1,366,000.00	1,200,000.00
022	> 902.000,00	s/d	1,034,000.00	968,000.00
023	> 744.000,00	s/d	902,000.00	823,000.00
024	> 656.000,00	s/d	744,000.00	700,000.00
025	> 534.000,00	s/d	656,000.00	595,000.00
026	> 476.000,00	s/d	534,000.00	505,000.00
027	> 382.000,00	s/d	476,000.00	429,000.00
028	> 348.000,00	s/d	382,000.00	365,000.00
029	> 272.000,00	s/d	348,000.00	310,000.00
030	> 256.000,00	s/d	272,000.00	264,000.00
031	> 194.000,00	s/d	256,000.00	225,000.00
032	> 188.000,00	s/d	194,000.00	191,000.00
033	> 136.000,00	s/d	188,000.00	162,000.00
034	> 128.000,00	s/d	136,000.00	132,000.00
035	> 104.000,00	s/d	128,000.00	116,000.00
036	> 92.000,00	s/d	104,000.00	98,000.00
037	> 74.000,00	s/d	92,000.00	83,000.00
038	> 68.000,00	s/d	74,000.00	71,000.00
039	> 52.000,00	s/d	68,000.00	60,000.00
040	< 52.000,00	s/d		50,000.00

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN, B.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NJOP
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB P2

Format Keputusan Bupati tentang Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PERTAMA : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi Sektor Perdesaan dan Perkotaan untuk masing-masing Desa/Kelurahan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai dasar perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai

- 2 -

dasar penetapan NJOP Bangunan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (.) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah merupakan dasar pengenaan pajak, sehingga penggunaan NJOP di luar kepentingan perpajakan bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Pajak
- KEENAM : Untuk NJOP Tahun Pajak berikutnya selama 3 (tiga) tahun tidak ada perkembangan wilayahnya maka Keputusan Bupati ini masih berlaku.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B

- 3 -

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR :
TANGGAL :

KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP BUMI
TAHUN

PROFINSI : 11-ACEH KECAMATAN :
KABUPATEN : 32-ACEH TENGGARA DESA/KEL :

BLOK	NAMA JALAN	KODE ZNT	KELAS BUMI	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./m ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp./m ²)

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B